

LHP BPK

Dewan Panggil BPK dan Fitra

SEMARANG - DPRD Jateng sepertinya masih belum puas dengan penjelasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait LHP BPK RI atas APBD Jateng TA 2014 yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi dengan beberapa catatan. Dewan bakal memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) untuk menindaklanjuti LHP APBD Jateng tersebut.

Rencananya Badan Anggaran (Banggar) bakal menelusuri catatan apa saja yang diberikan BPK tersebut. Langkah ini dilakukan mengingat DPRD Jateng tidak bisa membentuk panitia kerja (Panja) Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 sesuai Tatib DPRD Jateng Pasal 180 dan 181, jika opini yang diberikan BPK RI adalah WTP. "Jadi nanti kami tetap menindaklanjuti LHP APBD 2014 itu dengan memanggil BPK RI dan sejumlah institusi lain," kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, kemarin.

Dia menambahkan, dewan bakal mengundang BPK RI Senin (22/6); kemudian mengundang LSM Fitra Selasa (23/6) serta Rabu (23/6) Banggar memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Kami ingin agar semua bisa menganalisa dan mengali bersama terkait dengan LHP BPK RI dan catatan-catatan yang diberikan," imbuhnya. Dewan mengaku perlu melakukan itu, karena penjelasan Ganjar belum memuaskan. Bahkan, ketika Dewan meminta jawaban, Ganjar tidak memberikan jawaban yang pasti. (fth/ric/ce1)